



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANJAR SUPRAPTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 484518

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 460.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/96 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 91.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA SEPEDA MOTOR Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
5. MOBIL, MITSUBISHI MIRRAGE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 4.171.572

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 555.171.572



III. HUTANG

Rp. 88.502.506

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 466.669.066

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.